

Integrasi SDGs dalam Perencanaan Strategis BUMKAl: Studi Kasus di Binangun Raharja, Kalurahan Pagerharjo

Integrasi SDGs dalam Perencanaan Strategis BUMKAl: Studi Kasus di Binangun Raharja, Kalurahan Pagerharjo

^{1*)}Rudy Suryanto, ²⁾Hafiez Sofyani, ³⁾Rizka Amalia, ⁴⁾Indah Yani

^{1,2)}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

³⁾Magister Akuntansi, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

⁴⁾Business and Sustainability Research Center, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Kapas No.9, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

*Email korespondensi: rudy@umy.ac.id

Histori Artikel:

Diajukan:
09/07/2025

Diterima:
10/03/2026

Diterbitkan:
31/03/2026

ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAl) Binangun Raharja, Desa Pagerharjo, Kabupaten Kulonprogo, dengan menciptakan rencana strategis berkelanjutan menggunakan (SDGs). Permasalahan utama yang dihadapi oleh para mitra adalah, tidak adanya dokumen perencanaan strategis berbasis keberlanjutan, keterlibatan masyarakat yang lemah, dan sedikitnya kegiatan pelaporan akuntabilitas. Program ini dilaksanakan secara partisipatif, yaitu melalui (FGD), pelatihan, dan lokakarya pengembangan rencana strategis yang melibatkan pengurus (BUMKAl), akademisi, dan masyarakat setempat. Hasil program pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa para peserta memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, akuntabilitas kelembagaan, dan peran masyarakat sebagai bagian dari perencanaan bisnis di desa. Hasil dari kegiatan ini adalah rancangan usulan rencana strategis BUMKAl sesuai dengan SDGs, peningkatan kemampuan pengelola BUMKAl dalam perencanaan strategis, dan identifikasi unit usaha peternakan kambing potensial sebagai produk unggulan desa yang dapat diperkenalkan dalam program Pemerintah Koperasi Merah Putih. Program tersebut menyediakan pendekatan partisipatif berbasis SDGs untuk menciptakan rencana strategis usaha milik desa (BUMKAl), yang dapat meningkatkan tata kelola lembaga ekonomi desa secara lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selain itu, terus mendukung rencana strategis dan memperkuat sistem pelaporan kinerja BUMKAl, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya agar program tersebut berkelanjutan dan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kata kunci: BUMKAl, SDGs, Perencanaan Strategis.

ABSTRACT

This community service program aims to improve the institutional capacity of the Village-Owned Enterprise (BUMN) Binangun Raharja, Pagerharjo Village, Kulonprogo Regency, by creating a sustainable strategic plan using the Sustainable Development Goals (SDGs). The main problems faced by the partners were the absence of sustainability-based strategic planning documents, weak community involvement, and minimal accountability reporting activities. This program was implemented in a participatory manner, namely through focus group discussions (FGDs), training, and strategic plan development workshops involving BUMKAl administrators, academics, and the local community. The results of the community service program showed that participants gained a deeper understanding of the principles of sustainable development, institutional accountability, and the role of the community as part of business planning in the village. The results of this activity were a draft proposed

BUMKal strategic plan in accordance with the SDGs, increased capacity of BUMKal managers in strategic planning, and identification of potential goat farming business units as a superior village product that can be introduced in the Red and White Cooperative Government program. The program provides a participatory, SDG-based approach to creating strategic plans for village-owned enterprises (BUMKal), which can improve the governance of village economic institutions in a more responsible and sustainable manner. Furthermore, it continues to support strategic plans and strengthens BUMKal performance reporting systems, and collaborates with local governments and other stakeholders to ensure the program's sustainability and effectiveness in improving the well-being of village communities.

Keywords: BUMKal, SDGs, Strategic Planning

PENDAHULUAN

Reformasi tata kelola desa di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (tidak tentang Desa) (Iskandar, 2020). Salah satu bentuk implementasi strategi kebijakan ini adalah penyaluran Dana Desa yang secara kumulatif akan mencapai Rp610 triliun selama periode 2015-2024 secara kumulatif (Jenadri Ndiy, 2024). Dana tersebut dikondisikan untuk mendorong partisipatif dan penguatan berdasarkan potensi lokal (Akbar et al., 2023). Namun, besarnya alokasi anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan pencapaian kinerja pembangunan di tingkat desa. Dalam banyak kasus, lemahnya tata kelola, minimnya kapasitas kelembagaan desa, serta lemahnya pengintegrasian prinsip-prinsip keinginan untuk menjadi penghambat dalam mengalokasikan dana desa dengan baik (Handajani et al., 2021).

BUMDes/BUMKal sebagai badan usaha desa direncanakan menjadi motor penggerak perekonomian lokal di bawah pengelolaan unit-unit usaha berbasis potensi wilayah (Karyana, 2023). Sektor dengan angka kembangkan salah yang tinggi merupakan sektor pariwisata desa berkembang karena memiliki efek ganda dalam meningkatkan pendapatan desa, penenak lapangan kerja, dan penguatan identitas serta kearifan masyarakat lokal (Widyastuti et al., 2020). Meskipun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMKal di sektor pariwisata, hampir tidak terintegrasinya prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam perencanaan usaha masih partisipatif, serta belum terintegrasinya prinsip (SDGs) dalam pengelolaan usaha. Situasi ini berpotensi memperparah kesenjangan antara keberhasilan dan kemunduran di bidang ekonomi dan siklus hidup sosial dan lingkungan berdasarkan kasus per kasus (Dewi et al., 2024).

Permasalahan tersebut juga terdapat pada mitra kegiatan pengabdian, yaitu BUMKal

Binangun Raharja di Kabupaten Kulonprogo, Kalurahan Pagerharjo. BUMKal telah mengembangkan beberapa unit usaha seperti warung desa, kawasan rekreasi pengelolaan, *homestay* dan juga layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Berdasarkan observasi di awal dan diskusi dengan pengelola, namun, beberapa permasalahan utama yang terjadi besok mitra hadapi. Pertama, BUMKal masih belum memiliki dokumen rencana strategis pengembangan usaha yang terstruktur dengan baik dan berdasarkan prinsip pengembangan jangka panjang. Perencanaan usaha masih bersifat jangka pendek dan masih perlu mengacu pada kerangka pembangunan berkelanjutan seperti SDGs Desa. Partisipasi masyarakat adalah proses perencanaan pengambilan keputusan terbatas, sampai belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan pembangunan partisipatif yang menjadi prinsip utama pengelolaan desa. Ketiga, belum tersedianya sistem pelaporan kinerja transparan, dan akuntabel, yang percayungan, yang berkaitan, aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dari kegiatan usaha BUMKal. Situasi ini berpotensi melemahkan dalam proses penguatan legitimasi penyelenggaraan usaha desa, serta mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelola (Alshbili et al., 2021).

Selain itu, pengelola BUMKal juga menghadapi tantangan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas dalam memahami dan mengimplementasikan konsep pengembangan usaha berbasis SDGs, khususnya dalam konteks mengintegrasikan aspek keinginan dalam pendekatan strategis dalam berbisnis dan mengelola organisasi. Akibatnya, potensi ekonomi desa yang berbasis pariwisata belum dapat dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan suatu intervensi tertentu, tidak sekedar penyimpanan konseptual tetapi juga praktis melalui peningkatan kelembagaan partisipasi

masyarakat dalam proses perencanaan strategis BUMKAL.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberdayakan peningkatan kapasitas kelembagaan BUMKAL melalui lokakarya penyusunan rencana strategi pengembangan usaha berbasis (SDGs) yang mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat dan akuntabilitas. BUMKAL Binangun Raharja diharapkan mampu menyusun mata rantai pengembangan usaha yang lebih terstruktur, transparan, dan berkelanjutan, hingga mampu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat, memperkuat tata kelola organisasi, dan mendorong terciptanya ekosistem pariwisata desa yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE

Waktu dan tempat

Waktu dan Tempat

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Desa Pagerharjo di Badan Usaha Milik Desa (BUMN) Binangun Raharja yang terletak di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga bulan, antara April dan Juni 2025. Lokasi pengabdian masyarakat dipilih di BUMN Binangun Raharja yang memiliki potensi tinggi pengembangan ekonomi lokal, terutama di sektor pariwisata desa, namun belum siap dengan perencanaan strategis yang dikombinasikan dengan konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Sumaryana et al., 2024). Kondisi seperti itu perlu adanya pendampingan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan BUMN agar dapat menghasilkan rencana strategis yang lebih sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan..

Dalam pelaksanaannya, tim pengabdian berperan dalam merancang program, menyediakan sumber daya pelatihan, serta memfasilitasi proses pengembangan rencana strategis selama implementasi. Mitra berperan dalam mengatur peserta, menyediakan fasilitas kegiatan, dan memfasilitasi proses pelaksanaan program.

Tahapan dan Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif

dan edukatif, yang dilaksanakan dalam sejumlah tahapan dan sebagai berikut:

- Tahap Identifikasi permasalahan
Tahap pertama dilakukan melalui Diskusi Kelompok Fokus (FGD) yang melibatkan manajemen BUMKAL dan perwakilan masyarakat desa dengan tujuan memetakan kondisi terkini lembaga BUMKAL. Pada tahap ini, sejumlah area kunci diuraikan, termasuk manajemen unit bisnis, proses pengambilan keputusan, dan posisi perencanaan bisnis yang berlaku. Temuan dari identifikasi ini diterapkan sebagai masukan untuk penyusunan kebutuhan pendampingan dan program pengabdian masyarakat.
- Tahap Sosialisasi Program
Proses sosialisasi dilakukan dengan manajemen BUMKAL dan para pemangku kepentingan untuk menginformasikan mereka tentang tujuan, urgensi, dan manfaat kegiatan pengabdian masyarakat. Latihan ini dilakukan untuk membangun kesamaan pandangan tentang pentingnya merumuskan rencana strategis menggunakan SDGs dan untuk memotivasi para mitra agar aktif terlibat dalam proses tersebut.
- Tahap Lokakarya Pengembangan Rencana Strategis Berkelanjutan.
Tahap ini berupa lokakarya pengembangan rencana strategis berdasarkan SDGs di BUMKAL. Lokakarya ini berbasis partisipatif dan mencakup berbagai kegiatan utama, termasuk pengenalan tentang dasar-dasar SDGs, pelatihan teknis tentang perencanaan strategis partisipatif, dan penyusunan draf awal dokumen rencana strategis BUMKAL. Upaya ini mendorong keterlibatan aktif para peserta untuk memahami konsep-konsep tersebut dan menghubungkannya secara langsung dengan konteks kelembagaan mereka.

Evaluation

Evaluasi kegiatan dilakukan secara formatif dan reflektif melalui observasi selama kegiatan berlangsung serta diskusi kelompok di akhir

sesi. Evaluasi difokuskan pada peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep SDGs, kemampuan dalam merumuskan strategi pengembangan usaha BUMKAl, serta tingkat partisipasi peserta selama proses kegiatan berlangsung. Selain itu, refleksi bersama juga dilakukan untuk mengidentifikasi peluang tindak lanjut dan penguatan kelembagaan BUMKAl ke depan (Fitriani et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil:

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini merupakan masukan akademis nyata untuk meningkatkan tata kelola lembaga ekonomi desa melalui sinergi antara universitas dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMKAl). Kegiatan ini berupa lokakarya tentang bagaimana mengejar rencana strategis berkelanjutan yang berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).



Gambar 1. Tim pengabdian BUMKAl Pagerharjo

Pelatihan Penyusunan Rencana Strategis Berbasis SDGs

Selain itu, temuan lain dari kegiatan pengabdian masyarakat ini juga mengungkapkan peluang strategis dalam kebijakan Koperasi Merah Putih yang diluncurkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai program ketahanan pangan nasional. Tim pengabdian masyarakat mengevaluasi bahwa unit peternakan kambing di BUMKAl merupakan sumber daya produktif yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan diintegrasikan ke dalam ekosistem pasar lokal, sesuai dengan rantai nilai hulu-hilir. Hal ini juga menciptakan ruang untuk diferensiasi dan pembentukan identitas

ekonomi desa yang unik, terutama strategi branding tempat yang didasarkan pada peluang yang ditawarkan oleh komoditas yang lebih baik yang dihasilkan oleh desa. Dalam sesi ini, kemampuan manajemen BUMKAl untuk mengembangkan arah kebijakan kelembagaan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang telah diidentifikasi. Isi pelatihan meliputi: (1) dasar-dasar pembangunan berkelanjutan, (2) format dokumen rencana strategis kelembagaan, dan (3) pentingnya akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaporan kinerja organisasi desa. Gambar 2.



Gambar 2. Pelatihan Rencana Strategis Berbasis SDGs

Strategi peningkatan branding

Pendekatan partisipatif memungkinkan para peserta untuk menghasilkan kerangka kerja asli dokumen rencana strategis BUMKAl, yang mencakup visi, misi, tujuan strategis, program prioritas, dan indikator kinerja utama yang selaras dengan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, para peserta diberikan pemahaman tentang pentingnya membuat laporan keberlanjutan sebagai bentuk akuntabilitas publik dan cara untuk membangun kepercayaan publik.

Untuk mengukur efektivitas kegiatan pengabdian masyarakat, indikator pencapaian yang diperoleh setelah implementasi program ini adalah:

- Pemahaman yang lebih baik dari manajemen BUMKAl terkait dengan gagasan pembangunan berkelanjutan dan kebutuhan untuk memasukkan SDGs ke dalam perencanaan kelembagaan.
- Pengembangan awal draf dokumen rencana strategis BUMKAl yang berisi

- visi, misi, tujuan strategis, dan program pengembangan usaha prioritas.
- Peran yang lebih besar dari manajemen desa dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan BUMKAL.
 - Peningkatan perhatian terhadap nilai akuntabilitas dan pelaporan kinerja kelembagaan, yang mungkin juga menyiratkan pengenalan laporan keberlanjutan di BUMKAL.
 - Potensi peluang untuk membangun usaha desa yang lebih baik, khususnya unit peternakan kambing yang dapat digabungkan dengan kebijakan ekonomi nasional telah diidentifikasi.

Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan edukatif dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan BUMKAL dalam menghasilkan rencana strategis yang berorientasi pada keberlanjutan. Hal ini mendukung gagasan yang dikemukakan oleh Prasanna et al. (2019), yang menekankan perlunya melibatkan aktor lokal dan akademisi dalam pembangunan tata kelola desa yang lebih adaptif dan inklusif.

Mengikutsertakan prinsip-prinsip SDGs dalam dokumen perencanaan strategis BUMKAL merupakan langkah penting untuk mendorong perubahan kelembagaan dalam orientasi strategi BUMKAL dari fokus ekonomi jangka pendek menuju pembangunan desa yang lebih berkelanjutan secara sosial dan lingkungan. Proses pengembangan rencana strategis yang kolaboratif juga meningkatkan legitimasi sosial BUMKAL, karena masyarakat dan aktor penting lainnya terlibat secara aktif.

Selain itu, identifikasi peluang strategis, yaitu pengembangan unit peternakan kambing dan integrasinya dengan program nasional yang disebut Koperasi Merah Putih, menyoroti pentingnya korelasi antara potensi lokal dan kebijakan makroekonomi. Hal ini berlaku untuk apa yang disebut glocalisasi, yang berarti kombinasi strategi lokal dan global untuk menciptakan daya saing ekonomi desa (Nguyen et al., 2019). Hal ini juga terungkap dari fakta bahwa para peserta memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang pentingnya akuntabilitas dan pelaporan keberlanjutan, yang berarti bahwa literasi kelembagaan dapat ditingkatkan

dengan bantuan pendekatan berbasis komunitas. Mulyanto dkk. (2024), transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat merupakan elemen penting bagi keberhasilan jangka panjang (BUMKAL).

Oleh karena itu, hasil dari kegiatan ini bukan hanya dokumen rencana strategis tetapi juga promosi perubahan organisasi dalam budaya menuju keterbukaan, partisipatif, dan responsif terhadap tuntutan keberlanjutan. Model intervensi yang sama dapat direproduksi di lingkungan desa lain, dengan modifikasi sesuai dengan kekhasan sosial-ekonomi lokal.

Latihan pengabdian masyarakat ini akan menggabungkan strategi perencanaan strategis BUMKAL dengan model Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui lokakarya partisipatif dan pendampingan langsung kepada administrator BUMKAL. Dibandingkan dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang cenderung lebih berfokus pada pelatihan manajemen bisnis desa, kegiatan ini berfokus pada:

- Pengintegrasian konsep SDGs dalam dokumen perencanaan strategis BUMKAL.
- Strategi partisipatif dalam perencanaan strategis kelembagaan desa.
- Meliputi bidang akuntabilitas dan pelaporan keberlanjutan dalam tata kelola BUMKAL.
- Menghubungkan potensi ekonomi lokal dengan kebijakan ekonomi nasional, termasuk program Koperasi Merah Putih.

Kegiatan ini tidak hanya menghasilkan dokumen rencana strategis, tetapi juga mendorong perubahan budaya organisasi BUMKAL dalam hal tata kelola yang lebih transparan, partisipatif, dan berfokus pada keberlanjutan. Model intervensi ini dapat direplikasi di BUMKAL atau BUMKAL desa lain dengan menyesuaikan diri dengan kekhasan sosial-ekonomi lokal.

SIMPULAN

Program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Kalurahan Pagerharjo bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Binangun Raharja (BUMKAL) dengan merancang rencana strategis berdasarkan SDGs. Program ini membantu pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 16 dan SDG 8) khususnya dalam pembentukan lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif, serta dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi lokal. Hasil implementasi tercermin dalam peningkatan pengetahuan tentang prinsip-prinsip keberlanjutan, relevansi keterlibatan masyarakat, dan praktik tanggung jawab dalam perencanaan bisnis desa di kalangan pengelola.

Program ini, melalui proses partisipatif, pelatihan teknis, dan pemetaan potensi ekonomi lokal, misalnya unit peternakan kambing, tidak hanya mendorong tata kelola yang baik, tetapi juga menciptakan potensi untuk meningkatkan citra desa berdasarkan komoditas berkualitas tinggi. Partisipasi masyarakat akan meningkatkan legitimasi sosial BUMKAL dan membantu membuatnya fleksibel untuk menghadapi tantangan pembangunan desa.

Meskipun demikian, masalah akses terbatas bagi peserta, kurangnya waktu untuk melaksanakannya, dan perlunya dukungan program lintas sektor merupakan hambatan bagi keberlanjutan hasil program. Dengan demikian, kerja sama jangka panjang dengan para pemangku kepentingan diperlukan untuk meningkatkan pengaruh dan memberikan keberlanjutan kelembagaan di masa depan.

Beberapa rekomendasi yang dapat dibuat sebagai tindak lanjut meliputi:

- Pendampingan lebih lanjut tentang implementasi rencana strategis BUMKAL, khususnya pengembangan unit bisnis prioritas dan pengembangan indikator kinerja kelembagaan.
- Peningkatan sistem akuntabilitas dan pelaporan kinerja di BUMKAL dan pembentukan laporan keberlanjutan sebagai salah satu mekanisme transparansi kepada masyarakat.
- Pembangunan basis sumber daya manusia administrator BUMKAL khususnya di bidang manajemen bisnis, pemasaran, dan manajemen keuangan desa.
- Peningkatan kemitraan dengan pemerintah daerah, universitas, dan sektor swasta untuk membantu pembangunan berkelanjutan potensi ekonomi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. A., Fauzan, M., Arsyad, A. A. h. J., & Barki, K. (2023). Implementasi pendekatan community empowerment untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah. *Journal of Scientech Research and Development*, 5(1), 65-76. doi:10.56670/jsrd.v5i1.95
- Alshbili, I., Elamer, A. A., & Moustafa, M. W. (2021). Social and environmental reporting, sustainable development and institutional voids: Evidence from a developing country. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 28(2), 881-895.
- Dewi, R. A. P. K., Robinson, P., Puspitarini, R. C., Maksin, M., Putri, R. Y., Hidayati, N., & Fitrianti, D. (2024). Relevansi Pembangunan Berkelanjutan dengan Risiko. *PERSPEKTIF*, 13(3), 767-784.
- Fitriani, D., Md Shahbudin, A. S., & Shauki, E. R. (2024). Exploring BUMDES accountability: Balancing expectations and reality. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2402083. doi:10.1080/23311975.2024.2402083
- Handajani, L., Muhsyaf, S. A., & Sokarina, A. (2021). Pendampingan Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(4), 296-303.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jenadri Ndiy, J. (2024). *Hegemoni Kepala Desa Periode 2018-2023 Dalam Pelaksanaan Kewenangan di Bidang Pemerintahan*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD",
- Karyana, Y. (2023). Inovasi pemberdayaan BUMDes sebagai simpul penggerak ekonomi masyarakat desa. *POPULIKA*, 11(1), 41-49.
- Nguyen, V. H., & Funck, C. (2019). Tourism's contribution to an equal income distribution: Perspectives from local enterprises. *Tourism Planning &*

- Development*, 16(6), 637-656.
doi:10.1080/21568316.2018.1563564
- Prasanna, R., Jayasundara, J., Naradda Gamage, S. K., Ekanayake, E., Rajapakshe, P., & Abeyrathne, G. (2019). Sustainability of SMEs in the competition: A systemic review on technological challenges and SME performance. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 5(4), 100.
doi:10.3390/joitmc5040100
- Widyastuti, S., & Ambarwati, S. (2020). *Increasing the rural economy of village owned enterprises BUMDes Antajaya Bogor*. Paper presented at the 6th Annual International Conference on Management Research (AICMaR 2019).